

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN SIAK

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



OLEH:

YON RIAN SEPTIADI

NPM: 165110331

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YON RIAN SEPTIADI
TEMPAT/TGL LAHIR : PEKANBARU, 25 SEPTEMBER 1997
NPM : 165110311
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI
KABUPATEN SIAK

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 04 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



(YON RIAN SEPTIADI)

ABSTRAK

ANALISIS INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KABUPATEN SIAK

OLEH:

YON RIAN SEPTIADI

NPM. 165110331

(Dosen Pembimbing 1: Drs. M. Nur)

(Dosen Pembimbing 2: MM, M. Irfan Rosyadi, SE., M.E)

Penelitian ini yang berjudul “Analisis Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Siak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak pada periode 2010-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi adalah seluruh data dari Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak. Sedangkan pengambilan sampel berdasarkan variabel-variabel yang digunakan yaitu Investasi (X_1) dan Pengeluaran Pemerintah (X_2) Terhadap Produk Domestik regional Bruto (Y) di Kabupaten Siak selama periode 2010-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB (Y) di Kabupaten Siak dengan nilai koefisien sebesar 0.003260 dengan signifikansi sebesar 0.0553 ($<0,05$). Sedangkan Pengeluaran Pemerintah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB (Y) di Kabupaten Siak dengan nilai koefisien sebesar -0.052699 dengan signifikansi sebesar 0.0557 (<0.05). Serta berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 0.096837 (<0.05) dengan koefisien probabilitas 0.0000 berarti variabel Investasi (X_1) dan Pengeluaran Pemerintah (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y) di Kabupaten Siak.

Kata Kunci: PDRB, Investasi, Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

THE GOVERNMENT'S INVESTMENT AND EXPENSE ANALYSIS OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT IN SIAK DISTRICT

BY:

YON RIAN SEPTIADI

NPM: 165110331

(Consultant 1: Drs. M. Nur, MM)

(Consultant 2: MM, M. Irfan Rosyadi, SE.,M.E)

The study was entitled "government investment and expense analysis of the gross domestic product (PDRB) in Siak district. The study aims to analyze the impact that government investments and expenditures may have on the gross domestic product in Siak district in 2010-2019. This study uses secondary data with the population is all the data from the government's investment and expenditures on regional gross domestic products in Siak district. On the basis of variables used, investment (X1) and government expenditure (X2) of regional gross domestic product (Y) in Siak district during the 2010-2019 period. The result show that investment (X1) has a positive and significant impact on PDRB (Y) in Siak district with a coefficient value of 0.003260 with a significant 0.0553 (<0.05). While government spending (X2) has a negative and significant effect on PDRB (Y) in Siak district with a coefficient value of -0.052699 with a significant 0.0557 (<0.05). And based on the result of the show that an F by 0.096837 (<0.05) with a coefficient probability of 0.0000 means an investment variable (X1) and government spending together (X2) significantly affect PDRB (Y) in Siak district.

Keywords: PDRB, investment, government spending

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk berpikir terhadap alam dan lingkungannya serta dan kesungguhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul: “Analisis Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Siak”.

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk skripsi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak ada kata yang lebih banyak kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam dari penulis kepada:

1. Bapak Dr. Firdaus A. Rahman, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Islam Riau.
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada jurusan Ekonomi Pembangunan.

5. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. M. Nur, MM dan bapak M. Irfan Rosyadi, SE.,M.E selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan motivasi.
6. Khususnya penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah banyak memberikan semangat serta dorongan untuk kesuksesan dalam bangku pendidikan.
7. Orang yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis yaitu : Kakak, Saudara dan Teman-teman.
8. Orang yang telah banyak memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis yaitu : Sri Indriyani, M. Agus Raflianto, dan serta teman-teman lainnya.

Akhir kata kepada-Nya jualah penulis menyerahkan diri semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Penulis

Yon Rian Septiadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi	11
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik	12
2.1.3 Teori Pertumbuhan Menurut Adam Smith	13
2.1.4 Teori Pertumbuhan Menurut David Ricardo	14
2.1.5 Sektor Unggulan di Kabupaten Siak	16
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto	16
2.1.7 Investasi	19
2.1.8 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	20

2.1.9 Penanaman Modal Asing (PMA).....	21
2.1.10 Pengeluaran Pemerintah	22
2.1.11 Hubungan antara investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	25
2.1.12 Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk domestik regional bruto	30
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Hipotesa.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Penelitian	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Definisi Variabel Penelitian	37
3.5 Metode Analisis Data	38
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.5.2 Uji Regresi Linier Berganda	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Siak	44
4.1.2 Perekonomian di Kabupaten Siak.....	45
4.1.3 Perkembangan PDRB di Kabupaten Siak.....	46
4.1.4 Perkembangan Investasi di Kabupaten Siak	47
4.1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Siak	49

4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Uji T Statistik.....	51
4.2.2 Uji F Statistik.....	52
4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	53
4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.1 Pengaruh Investasi Terhadap PDRB di Kabupaten Siak.....	57
4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Kabupaten Siak.....	58
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: PDRB Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019 (Rupiah)	2
Tabel 1.2: Realisasi Investasi di Kabupaten Siak (Rupiah)	4
Tabel 1.3: Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Siak Tahun 2010-2019 (Rupiah).....	6
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1: PDRB Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019 (Rupiah)	47
Tabel 4.2: Realisasi Investasi di Kabupaten Siak (Rupiah).....	48
Tabel 4.3: Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Siak Tahun 2010-2019 (Rupiah).....	49
Tabel 4.4: Hasil Estimasi Uji Regresi	51
Tabel 4.5: Hasil Estimasi Multikolinieritas.....	54
Tabel 4.6: Hasil Estimasi Heteroskedastisitas.....	55
Tabel 4.7: Hasil Estimasi Autokorelasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berpikir	35
Gambar 2 : Hasil Uji Normalitas.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004).

Menurut Sadono Sukirno (1996), pengertian pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dari otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan negatif menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak meningkat cukup pesat, karena di dorong oleh sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian, perkebunan, dan juga potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai objek wisata sehingga potensi yang ada di daerah ini diberdayakan maka sangat besarlah manfaatnya dan dapat menunjang terciptanya suatu kegiatan ekonomi yang ada disekitar daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Namun, penurunan sektor unggulan seperti minyak dan gas bumi menyebabkan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi nilai rill PDRB terus meningkat. Berikut PDRB Kabupaten Siak:

Tabel 1.1: PDRB Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019

No	Tahun	PDRB (Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
1	2010	52.420.353.850.000	6.11 %
2	2011	52.146.929.560.000	2.62 %
3	2012	53.226.798.430.000	3.03 %
4	2013	51.987.673.970.000	4.92 %
5	2014	51.485.182.580.000	4.31 %
6	2015	51.379.296.290.000	2.59 %
7	2016	51.557.220.020.000	1.97 %
8	2017	52.029.652.600.000	3.11 %
9	2018	52.610.802.480.000	3.16 %
10	2019	53.410.041.140.000	4.52 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dijelaskan dalam kurun waktu 2010 sampai 2019 keadaan PDRB Kabupaten Siak tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp53.410.041.140.000 dengan presentase 4.52%. Dan keadaan PDRB Kabupaten Siak terendah pada tahun 2015 sebesar Rp51.379.296.290.000 dengan presentase 6.11%.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, suatu daerah memerlukan anggaran dana yang memadai. Setiap daerah di Indonesia harus mempunyai hubungan ekonomi di pemerintahan pusat hubungan tersebut termasuk aliran uang masuk dan keluar, berupa dalam pinjaman, devisa, investasi. Dalam rangka peningkatan kegiatan investasi, pengusaha sangat membutuhkan modal yang merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan investasi. Modal yang dibutuhkan oleh investor dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam tingkat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah Kabupaten Siak sering diperhadapkan oleh berbagai macam permasalahan yang timbul dalam perekonomian, seperti tingkat inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi dan sebagainya. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, diperlukan suatu kebijakan dalam rangka untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah timbulnya permasalahan tersebut. Oleh karena permasalahan tersebut secara langsung menyangkut variable-variabel ekonomi secara agregat, maka kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah. Dimana kebijakan pengeluaran pemerintah

daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan agar tercapainya kestabilan ekonomi yang lebih mantap.

Menurut Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005) peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara garis besar pemikiran mereka sebagai berikut: *Pertama*, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. *Ketiga*, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. *Keempat*, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing selanjutnya lebih produktif). Berikut adalah tabel tingkat investasi di Kabupaten Siak:

Tabel 1.2: Realisasi Investasi di Kabupaten Siak Tahun 2010 - 2019

No	Tahun	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Jumlah Investasi (Rp)
1	2010	64.565.910.000.000	183.990.000.000	64.749.900.000
2	2011	898.535.601.356.000	410.719.900.000	898.946.321.256.000
3	2012	7.083.602.955.600.000	1.195.675.400.000	7.084.798.631.000.000
4	2013	7.891.919.553.000.000	681.172.800.000	7.892.600.725.800.000
5	2014	4.887.090.000.000.000	2.395.750.000.000	4.889.485.750.000.000
6	2015	95.275.080.000.000	527.646.100.000	95.802.726.100.000
7	2016	3.895.353.455.100	739.669.500.000	4.635.022.955.100
8	2017	1.384.542.601.078	629.851.913.180	2.014.394.514.258
9	2018	17.715.906.657.000	258.475.600.000	17.974.382.257.000
10	2019	3.088.494.633.150.000	1.902.345.500.000	3.090.396.978.650.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (DPMPTSP), 2020

Berdasarkan Tabel 1.2, perkembangan realisasi Investasi selama sepuluh tahun dari 2010-2019 Investasi mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi.

Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp7.084.798.631.000.000

sementara pada tahun 2015-2018 realisasi Investasi menurun secara bertahap dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp95.802.726.100.000 dan pada tahun 2015 tersebut juga merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dalam kurun waktu 2010-2019, dan pada tahun 2016-2019 realisasi Investasi Kabupaten Siak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015.

Penanaman modal asing sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak. Penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkat sifat khususnya berupa paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan (Sumantoro, 1983).

Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk meningkatkan tingkat investasi antara lain Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dan Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Kabupaten Siak juga ikut berperan untuk meningkatkan iklim usaha dengan menciptakan iklim usaha kondusif lewat pelayanan satu pintu (*One Stop Service*), perlindungan investasi (*Task Force*), maupun pemberian insentif bagi penanaman modal.

Pembiayaan pembangunan daerah selain diperoleh dari penanaman modal swasta juga dari pemerintah yaitu belanja daerah. Hal ini disebabkan karena

belanja daerah adalah pengeluaran yang berkaitan dengan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan di Kabupaten Siak. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam menyediakan sarana infrastruktur dapat dilihat dari nilai realisasi belanja daerah dalam APBD pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar nilai belanja daerah, maka semakin besar pula peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Begitu juga sebaliknya, dengan anggapan bahwa besarnya peranan tersebut mencerminkan pemerintah ikut berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pendukung, maka akan berpengaruh secara positif terhadap besar kecilnya investasi di Kabupaten Siak. Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pengeluaran Pemerintah dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.3: Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Siak Tahun 2010-2019

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp)
1	2010	1.697.826.203.483
2	2011	1.676.721.824.656
3	2012	2.071.317.017.756
4	2013	2.285.374.036.987
5	2014	2.647.677.640.488
6	2015	2.690.439.086.559
7	2016	1.686.810.743.577
8	2017	1.630.363.401.908
9	2018	1.705.936.346.935
10	2019	1.998.537.794.856

Sumber: BPK RI Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan tabel 1.3, memperlihatkan perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Siak Tahun 2010-2019. Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2010 sebesar Rp1.697.826.203.483 Tahun 2012 total realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar Rp2.071.317.017.756 dan pada tahun 2016

mengalami penurunan sebesar Rp1.686.810.743.577 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi belanja sebesar Rp1.705.936.346.935.

Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis apabila proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu dalam Priyo, 2006).

Dari uraian di atas yang mana begitu pentingnya peran dari modal untuk proses pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang khususnya di Kabupaten Siak. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti akan pengaruh dari adanya modal bagi pembangunan, sehingga mendorong dilakukannya penelitian yang berjudul: “Analisis Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Siak tahun 2010-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak pada periode tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak pada periode tahun 2010-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak pada periode tahun 2010-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa secara bersama-sama apakah Investasi dan Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.
2. Untuk menganalisa pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.
3. Untuk menganalisa pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Dengan hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Siak dan instansi terkait dalam merencanakan dan meningkatkan PDRB yang ada di Kabupaten Siak.
2. Sebagai bahan acuan atau sumber referensi bagi para pembaca yang memerlukan serta sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.
4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP).

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tersebut agar pembahasan ini dapat dibahas lebih rinci an sistematika maka penulis membaginya ke dalam enam bab, dimana masing-masing yang semuanya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESA

Dalam bab ini dikemukakan Tinjauan Teoritis, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan PDRB, Hubungan Antar Variabel, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

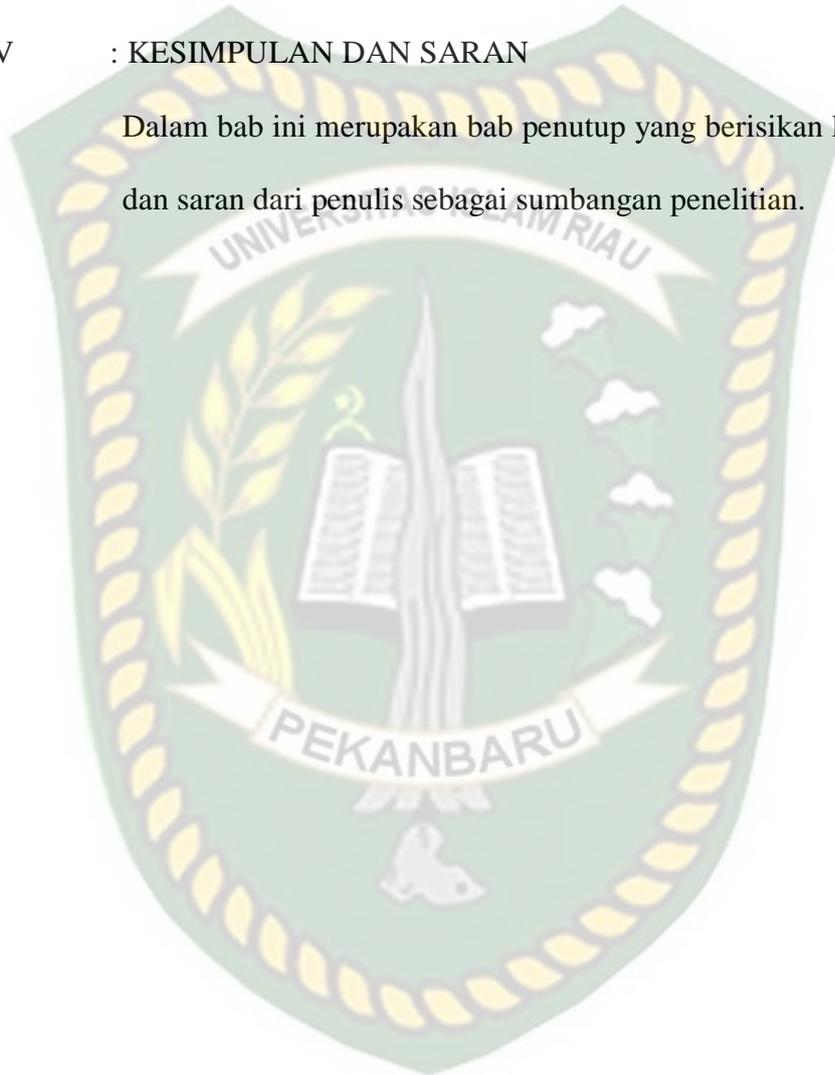
Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang berkaitan dengan Lokasi Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum yang berkaitan dengan Keadan Geografis, serta dipaparkan penyajian penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis sebagai sumbangan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertumbuhan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011).

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai tolak ukur dalam mengetahui seberapa maju dan berkembangnya suatu wilayah. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Suatu kondisi dimana terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah

produksi barang dan jasa. Setelah mengetahui pengertian pertumbuhan ekonomi, tentunya seluruh Negara menginginkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya. Maka, Negara-negara tersebut perlu melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah produk barang dan jasa.

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar Negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat pendapatan per kapita riil sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk secara keseluruhan, seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi diinvestasikan oleh rata-rata produk (Tadaro, 2011).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian Negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitik-beratkan

perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2011).

2.1.3 Teori Pertumbuhan menurut Adam Smith

Adam Smith sering kali disebut sebagai “bapak” dari ilmu ekonomi modern. Yang sebenarnya lebih dikenal dengan Teori Nilai yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Dalam bukunya yang monumental “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”.

Budiono (1992) mengemukakan secara garis besar, pemikiran Adam Smith bertumpu pada akselerasi sistem produksi suatu negara. Sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

1. Sumber-sumber alam.

Menurut Adam Smith, sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam

yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan.

2. Sumber daya manusia (jumlah penduduk).

Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

3. Stok barang kapital.

Adam Smith memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Di samping itu laju pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut David Ricardo

David Ricardo mengkritik pemikiran dari Adam Smith yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Ricardo pertumbuhan penduduk yang terlalu bahkan hingga dua kali lipat akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Tenaga kerja yang jumlahnya melimpah dapat menyebabkan menurunnya upah yang diterima, bahkan upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Bila hal ini terjadi maka, perekonomian akan mengalami stagnasi atau kemandekan yang dikenal dengan istilah *stationary state*.

Teori David Ricardo ini terkenal dengan *Law Of Diminishing Return*, Ricardo mengungkapkan bahwa keterbatasan produksi tanah yang bersifat tetap

sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam buku (Sukirno, 2010), yaitu:

- a. Pada mulanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Maka pada tahap ini akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan kerja.
- b. Tahap kedua jumlah tenaga kerja diperkejakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertumbuhan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah, akibatnya setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa tanah akan semakin tinggi. Hal tersebut akan mengganggu keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibatnya turunnya tingkat upah.
- c. Tahap selanjutnya ditandai menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

2.1.5 Sektor Unggulan di Kabupaten Siak

Struktur ekonomi dengan migas menurut lapangan usaha didominasi oleh tiga sektor terbesar yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang memiliki sumbangan terbesar terhadap total PDRB dengan migas adalah pertambangan dan penggalan, dan sektor yang mempunyai sumbangan terkecil adalah sektor listrik, gas dan air minum. Namun apabila unsur migas dikeluarkan dari perhitungan perekonomian Kabupaten Siak maka sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak dan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Siak selain sektor industri tanpa migas dan sektor perdagangan.

Komoditi unggulan Kabupaten Siak untuk sektor pertanian terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kabupaten Siak memiliki luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 4.675 hektar (lahan sawah produktif) dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (cadangan LP2B) seluas 2.610 hektar, sehingga total luasnya adalah 7.285 hektar. Potensi lahan sawah terbesar terdapat di 4 kecamatan yaitu kecamatan Bunga Raya, kecamatan Sungai Apit, kecamatan Sabak Auh, kecamatan Mandau.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar yang berlaku atau atas dasar harga

konstan. PDRB di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar (Widodo, 2006).

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun dapat digunakan 3 cara penghitung, yaitu:

a. Cara Produksi

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

b. Cara Pengeluaran

Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

c. Cara Pendapatan

Dalam penghitung ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang didapat atau diperoleh adalah:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku/nominal
 - 1) Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.
 - 2) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
- b. PDRB atas harga konstan
 - 1) Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.
 - 2) Mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau.

Setelah melihat pada uraian PDRB di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu. PDRB juga merupakan ukuran laju pertumbuhan suatu daerah. PDRB dalam hal

ini juga berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

2.1.7 Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Peningkatan investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga akan meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh

pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003).

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggairahan iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970.

2.1.8 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

2.1.9 Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *foreign investment*. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Menurut Salim H.S. dan Budi Sutrisno (2008), banyaknya keuntungan yang didapat oleh Indonesia dari penanaman modal asing membuat negara semakin tergantung dengan keberadaan penanaman modal asing, terutama dalam hal pembangunan ekonomi Indonesia.

Investasi baik dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan demikian semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada pada suatu daerah. Hal diharapkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2.1.10 Pengeluaran Pemerintah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk , 2008) adalah “semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan

belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

- a. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:
 - 1) Belanja pegawai
 - 2) Belanja barang
 - 3) Bunga
 - 4) Subsidi
 - 5) Hibah
 - 6) Bantuan sosial.
- b. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
 - 1) Belanja modal tanah
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin
 - 3) Belanja modal gedung dan bangunan
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
 - 5) Belanja modal aset tetap lainnya

- 6) Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
- c. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- d. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota serta dana bagi hasil dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
- b. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

2.1.11 Hubungan Antara Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2004), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru,

lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang.

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik (Boediono, 1992).

Menurut Todaro (1981) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*Capital Formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja ada pula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama, kecilnya jumlah mutlak kapital material. Kedua, terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk. Ketiga dan yang terakhir adalah rendahnya investasi netto. Akibat keterbatasan tersebut, Negara-negara berkembang mempunyai sumber daya yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dibidang pendidikan dan pelatihan.

Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*Vicious Circle*) yang berpendapat bahwa ketidak-mampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup dan kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal dan taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara berkembang.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini antara lain perkenomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*Full Employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh adapula asumsi yang menyatakan bahwa dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. Asumsi lain menyatakan besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). Asumsi yang terakhir menyatakan kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal output (*Incremental Capital Output Ratio*). Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan rasio penambahan modal output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu Negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak

perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Deddy, 2008).

Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Prasetyo, 2009).

Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal

untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

2.1.12 Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Halim (2004) belanja daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja daerah adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu Nordiawan (2006). Terdapat tiga cara untuk

memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja daerah memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja/biaya berdasarkan hubungannya dengan aktivitas di bagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), belanja Modal, Belanja Tidak tersangka, dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007 (Revisi atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait

langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. *Pertama*, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. *Kedua*, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y) dan Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung), yang didapat oleh sektor swasta. (Dornbusch dan Fischer, 1999) Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam resesi, pajak harus

dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh.

Untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat objektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang hampir sama, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Ringkasan
.1.	Juanita, 2006	Pengaruh penanaman modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan periode 1999-2003	Bahwa investasi asing mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti jika jumlah investasi asing meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.
2.	Rajamuddin, 2002	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Kredit Usaha Kecil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	Bahwa terbukti dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, PMA, dan kredit usaha kecil maka akan terjadi kenaikan Pertumbuhan ekonomi.
3.	Selli Imaniar, 2018	Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Tahun 2012-2016)	Hasilnya variabel (PMDN) berpengaruh signifikan, sedangkan (PMA) tidak berpengaruh signifikan terhadap (PDRB). Hal ini dimungkinkan oleh kebijakan pemerintah daerah yang mempersulit administrasi.

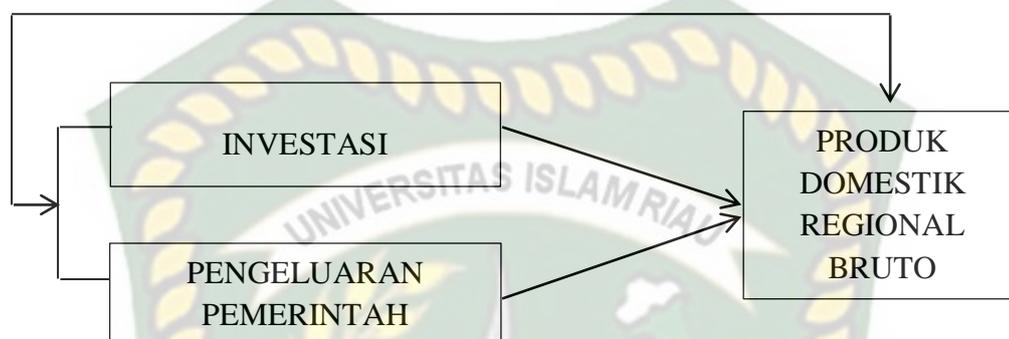
Sumber: Data Olahan, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah

terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak secara rinci penelitian diuraikan sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan, 2020

2.4 Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka hipotesa yang menjadi pedoman awal dalam penelitian ini adalah:

- a. Diduga secara bersama-sama Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak.
- b. Diduga Investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak.
- c. Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena di Kabupaten Siak mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam kegiatan ekonomi yang cukup pesat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari 2010-2019. Penelitian kuantitatif merupakan teknik pengambilan sampel data menggunakan instrument penelitian, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu (Darmadi, 2013).

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (DPMPTSP), data yang diperoleh adalah data realisasi Investasi tahun 2010-2019.
- b. BPS Kabupaten Siak, data yang diperoleh PDRB.
- c. BPK Provinsi Riau, data yang diperoleh adalah data realisasi belanja daerah di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka pengumpulan data yang dilakukan/diterapkan didalam penulis ini

adalah dengan cara teknik dokumentasi yaitu dengan mendatangi langsung instansi-instansi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga mengadakan wawancara tersebut memberikan lembaran-lembaran data untuk penelitian (variabel-variabel yang diperlukan).

3.4 Defenisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Pada dasarnya ada dua variabel yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Terikat (*Dependent Variables*)

Merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variasi yang dialami oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Y: PDRB di Kabupaten Siak dari tahun ke tahun dalam rupiah (Rp).

b. Variabel Bebas (*Independent Variables*)

Merupakan variabel yang mempengaruhi nilai variabel terikat dari variasi atau perubahan yang dialami variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya yaitu:

1) X_1 : Investasi Tahun 2010-2019 (Rp).

2) X_2 : Pengeluaran Pemerintah Tahun 2010-2019 (Rp).

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu regresi berganda. Dari analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (*Independent*) terhadap variabel terikat (*Dependent*). Menurut Noor (2014), analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap nilai Y. jadi model regresi pada penelitian adalah Widorjono, (2018):

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + e$$

Dimana:

Y = PDRB (Rupiah)

X₁ = Investasi (Rupiah)

X₂ = Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)

β₀-β₂ = Koefisien Regresi

β₀ = Konstanta

e = Error Term

t = Time

Secara ekonometrika model yang dinilai baik bila memenuhi asumsi *Ordinary Least Square* (OLS). Secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah asumsi klasik yaitu:

1. Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari value inflation factor (VIF) apabila nilai VIF (>10) maka terjadi multikolinieritas begitu pula sebaliknya jika VIF (<10) maka tidak terjadi multikolinieritas.

2. Uji Autokorelasi

Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel terikat tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel terikat tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri baik nilai sebelumnya maupun nilai periode nilai sesudahnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melakukan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan ketentuan sebagai berikut:

- H_0 : Model regresi bebas gejala autokorelasi
- H_1 : Model regresi terdapat gejala autokorelasi
- Jika nilai signifikan < 0.1 maka model regresi terdapat gejala autokorelasi
- Jika nilai signifikan > 0.1 maka model regresi bebas gejala autokorelasi

3. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut widarjono (2013) ada 2 metode untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, antara lain sebagai berikut:

- Histogram Residual, ciri utamanya yaitu bentuk grafik distribusi normal ialah menyerupai lonceng, apabila tidak berbentuk lonceng maka model regresi tersebut mempunyai distribusi tidak normal.
- Uji Jarque-Bera, model regresi yang mempunyai distribusi normal nilai JB nya harus diatas nilai Chi Square.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai ditribusi normal atau tidak. dalam uji ini, yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- Jika nilai signifikan > 0.1 maka distribusi normal.
- Jika nilai signifikan < 0.1 maka distribusi tidak normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan, lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini digunakan untuk metode white. Metode white mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan sebuah asumsi tentang adanya normalitas pada variabel

gangguan (Widarjono, 2013). Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *Chi Square* ($Obs \cdot R\text{-Square}$) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai *chi square* < nilai kritis, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Nilai *chi square* > nilai kritis, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2 Uji Regresi Linier Berganda

A. Uji T Statistika

Uji T merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas.

- Jika $T_{\text{prob}} < 0.1$ (α) maka H_0 ditolak, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $T_{\text{prob}} > 0.1$ (α) maka H_0 diterima, artinya masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan derajat kebebasan sebesar 10% ($\alpha = 0.1$). Uji - T dipakai dalam menguji signifikansi pada pengaruh tingkat Investasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB.

B. Uji F Statistik

Pada hasil uji F dapat ditunjukkan proporsi variabel dalam independen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama dapat dilakukan dengan menggunakan uji analisis (uji F). Tujuannya adalah

untuk menguji variabel independen manakah yang paling signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yang perlu dilakukan pengujian koefisien regresinya secara serentak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan evIEWS 9.0.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent (Investasi, Pengeluaran Pemerintah). Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (PDRB). Untuk uji F maka langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- Jika $F_{\text{prob}} < 0.1$ (α) maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{\text{prob}} > 0.1$ (α) maka H_0 diterima, artinya secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan menguji signifikan pada pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB.

C. Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan merujuk kepada kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien determinan bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel terikat. Dalam penelitian ini perhitungan koefisien determinan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas (Investasi, Pengeluaran Pemerintah) dalam menjelaskan variabel terikat (PDRB) nilai R^2 berkisaran 0-1.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Siak

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak terletak diantara $1^{\circ}16'30''$ LU - $0^{\circ}20'49''$ LU dan $100^{\circ}54'21''$ BT - $102^{\circ}10'59''$ BT, yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar 60% wilayah Kabupaten Siak, morfologi perbukitan rendah terdapat di bagian utara, timur, dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara, dan morfologi perbukitan tinggi terletak di bagian barat daya wilayah DAS Siak. Kabupaten Siak memiliki luas wilayah 8.556,09 km² dan merupakan kabupaten dengan luas yang mencapai 9.74% dari total wilayah Provinsi Riau.

Secara geografis, Kabupaten Siak berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera yang berbatasan dengan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.

Wilayah Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 122 desa dan 9 kelurahan dengan total luas wilayah 8.556.09 km².

4.1.2 Perekonomian di Kabupaten Siak

Perekonomian di Kabupaten Siak ada beberapa perkembangan sektor, salah satunya sektor perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Apabila dikelola dengan baik hasil kekayaan alam yang melimpah tersebut dapat dijadikan komoditas ekspor keluar daerah yang dapat memajukan perekonomian daerah. Ekspor dan impor merupakan salah satu indikator makro dalam suatu daerah. Kemampuan ekspor suatu daerah menunjukkan tingkat kemajuan dalam daya saing produk daerah tersebut terhadap pasar internasional. Impor menunjukkan beberapa hal, salah satunya adalah tidak tersedianya suatu komoditi di daerah atau dikatakan bahwa daerah tersebut belum mampu memproduksi ataupun mencukupi kebutuhan terhadap jenis-jenis barang tertentu.

Untuk menunjang sektor perdagangan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan dukungan dari sektor industri dan kerajinan. Dengan adanya sektor tersebut, maka nilai ekonomi suatu barang akan meningkat sehingga akan

semakin menambah daya jual suatu barang. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Siak dapat dijadikan sebagai bahan mentah untuk mengembangkan sektor industry dan kerajinan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja.

Untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah sangat diperlukan peran serta para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut sehingga dapat menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten Siak untuk menarik minat investor baik lokal maupun asing agar berinvestasi serta turut berperan serta dalam pembangunan pada berbagai sektor di Kabupaten Siak.

4.1.3 Perkembangan PDRB di Kabupaten Siak

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi di suatu daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan terutama oleh daerah berkembang untuk mencapai target pembangunan ekonomi di Kabupaten Siak. Jika terjadi pertumbuhan positif, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, hal ini menunjukkan adanya penurunan perekonomian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dari tahun ke tahun dilakukan dengan perhitungan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Berikut adalah kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Siak:

Tabel 4.1: PDRB Kabupaten Siak Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019

No	Tahun	PDRB (Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
1	2010	52.420.353.850.000	6.11 %
2	2011	52.146.929.560.000	2.62 %
3	2012	53.226.798.430.000	3.03 %
4	2013	51.987.673.970.000	4.92 %
5	2014	51.485.182.580.000	4.31 %
6	2015	51.379.296.290.000	2.59 %
7	2016	51.557.220.020.000	1.97 %
8	2017	52.029.652.600.000	3.11 %
9	2018	52.610.802.480.000	3.16 %
10	2019	53.410.041.140.000	4.52 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak 2020

Berdasarkan tabel 4.1, Perekonomian Kabupaten Siak dapat dijelaskan dalam kurun waktu 2010 sampai 2019 keadaan PDRB Kabupaten Siak tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp53.410.041.140.000 dengan presentase 4.52%. Dan keadaan PDRB Kabupaten Siak terendah pada tahun 2015 sebesar Rp51.379.296.290.000 dengan presentase 6.11%.

4.1.4 Perkembangan Investasi di Kabupaten Siak

Investasi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta.

Peningkatan peran serta dalam pembangunan ekonomi dengan penyediaan porsi investasi lebih besar kepada swasta. Sasaran investor sektor swasta pada dasarnya dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu melalui PMA/PMDN serta investasi tanpa fasilitas PMA/PMDN. Investasi yang dilakukan oleh swasta tersebut

merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus. Adapun realisasi investasi di Kabupaten Siak tahun 2010-2019, sebagai berikut:

Tabel 4.2: Realisasi Investasi di Kabupaten Siak Tahun 2010-2019

No	Tahun	Investasi (Rp)
1	2010	64.749.900.000.000
2	2011	898.946.321.256.000
3	2012	7.084.798.631.000.000
4	2013	7.892.600.725.800.000
5	2014	4.889.485.750.000.000
6	2015	95.802.726.100.000
7	2016	4.635.022.955.100
8	2017	2.014.394.514.258
9	2018	17.974.382.257.000
10	2019	3.090.396.978.650.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak (DPMPTSP), 2020.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa realisasi Investasi di Kabupaten Siak tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat realisasi investasi tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7.892.600.725.800.000 sedangkan realisasi paling rendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.014.394.514.258.

Investasi yang ada di Siak berupa industri di bidang pertambangan, industri pulp and paper yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga aktivitas perekonomian yang ada di Kabupaten Siak mengalami peningkatan. Dari aktivitas perekonomian tersebut banyak menyumbang peningkatan PDRB di Kabupaten Siak.

4.1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Siak

Menurut budiono (1981) pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). Kedua, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) serta untuk investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal). Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Seperti pengeluaran masyarakat maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui multiplier effect dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat sehingga PDRB akan meningkat. Adapun realisasi pengeluaran pemerintah di Kabupaten Siak Tahun 2010-2019, sebagai berikut:

Tabel 4.3: Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Siak Tahun 2010-2019

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp)
1.	2010	1.697.826.203.483
2.	2011	1.676.721.824.656
3.	2012	2.071.317.017.756
4.	2013	2.285.374.036.987
5.	2014	2.647.677.640.488
6.	2015	2.690.439.086.559
7.	2016	1.686.810.743.577
8.	2017	1.630.363.401.908
9.	2018	1.705.936.346.935
10.	2019	1.998.537.794.856

Sumber: BPK RI Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Siak mengalami fluktuasi. Realisasi Pengeluaran Pemerintah yang tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.690.439.086.559 sedangkan realisasi paling rendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.630.363.401.908.

Pengeluaran pemerintah membuat pertumbuhan ekonomi turun karena pengeluaran pemerintah belum memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak dalam jangka pendek, hal ini terjadi karena anggaran belanja pemerintah daerah khususnya di belanja pembangunan belum sepenuhnya termaksimalkan sehingga kurang mendorong sektor-sektor yang ada dalam PDRB di Kabupaten Siak.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan data sekunder yang membahas secara empiris yang berkaitan dengan Analisis Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak. Untuk lebih jelasnya deskripsi data dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dengan menggunakan Program Eviews 9 diketahui pengaruh investasi (X_1), Pengeluaran Pemerintah (X_2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) di Kabupaten Siak dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.4: Hasil Estimasi Uji Regresi

Dependent Variable: LY
 Method: Least Squares
 Date: 01/10/21 Time: 02:18
 Sample: 2010 2019
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.97045	0.624906	52.76068	0.0000
LX1	0.003260	0.001420	2.296316	0.0553
LX2	-0.052699	0.023003	-2.290978	0.0557
R-squared	0.486787	Mean dependent var	31.58651	
Adjusted R-squared	0.340155	S.D. dependent var	0.013355	
S.E. of regression	0.010849	Akaike info criterion	-5.966244	
Sum squared resid	0.000824	Schwarz criterion	-5.875468	
Log likelihood	32.83122	Hannan-Quinn criter.	-6.065824	
F-statistic	3.319782	Durbin-Watson stat	1.975399	
Prob(F-statistic)	0.096837			

Sumber: Hasil Data Olahan Eviews, 9

Dari hasil di atas, maka diketahui fungsi persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 32.97045 + 0.003260 X_1 + 0.052699 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah dari kedua variabel tersebut terhadap produk domestic regional bruto di Kabupaten Siak. Berikut akan dijelaskan tentang pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara rinci.

4.2.1 Uji T Statistik

Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara

individu (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji ini dapat dilakukan dengan ketentuan apabila prob. Variabel bebas (<0.1) maka H_0 ditolak dan apabila prob. Variabel bebas (>0.1) maka H_0 diterima. Berikut ini penjelasan mengenai Uji T (Uji Parsial):

1. Konstanta β_0 sebesar 32.97045 dengan prob. 0.0000.
2. Nilai koefisien regresi β_1 sebesar 0.003260 dengan nilai prob. Investasi sebesar 0.0553 (<0.1) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial Investasi berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019. Pengaruh positif tersebut artinya jika investasi mengalami peningkatan sebesar 1% maka PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0.003260.
3. Nilai koefisien regresi β_2 sebesar -0.052699 dengan nilai prob. Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.0557 (<0.1) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019. Pengaruh negatif tersebut artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1% maka PDRB akan terjadi penurunan sebesar -0.052699.

4.2.2 Uji F Statistkik

Dari hasil estimasi, diketahui bahwa nilai F prob. sebesar 0.096837 (<0.1) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel Inventasi dan Pengeluaran Pemerintah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.

4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

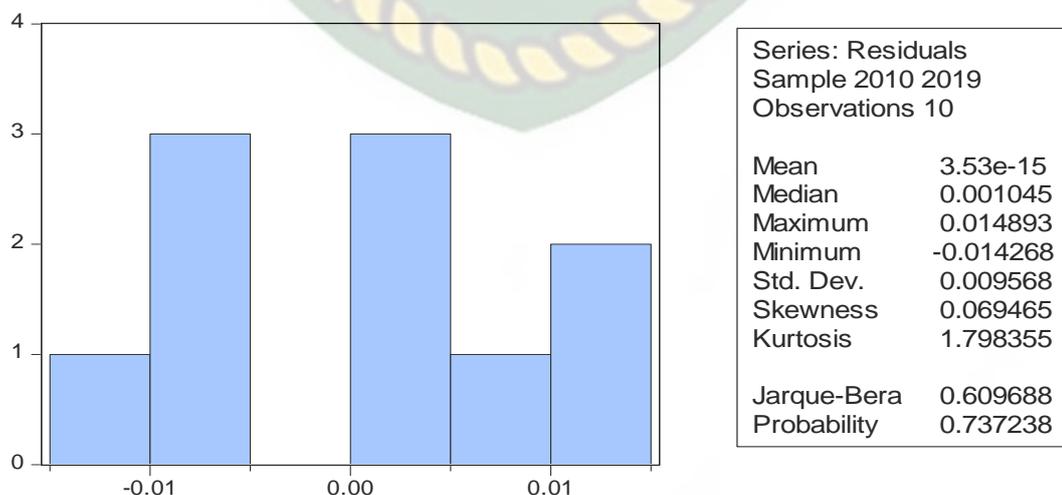
Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2) dilakukan untuk mengukur besar pengaruh seluruh variabel bebas (Investasi dan Pengeluaran Pemerintah) terhadap variabel terikat dalam bentuk persentase. Dapat diukur dengan cara menghitung angka koefisien determinasi (R^2). Semakin besar nilai koefisien determinasi (mendekati 1), maka akan semakin besar sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Diketahui nilai R^2 yaitu sebesar 0.48. Selama kurun waktu 2010-2019 sebesar 48.67% sedangkan sisanya sebesar 51.32% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar adanya penyimpangan atas asumsi klasik. Berikut akan dijelaskan dari hasil analisa pada uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas

Gambar 2: Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Data Olahan Eviews, 9

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak normal, bisa dilihat dari bentuk histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan Uji Jarque-Bera.

Dari hasil estimasi, bisa dilihat bahwa grafik histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai Jarque-Bera adalah 0.609688 dan nilai *Chi Square* adalah 13.36156. Nilai JB lebih kecil dari nilai *Chi Square* yang berarti model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.5: Hasil Estimasi Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 01/17/21 Time: 06:13
Sample: 2010 2019
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.390507	33180.66	NA
LX1	2.02E-06	189.5375	1.519453
LX2	0.000529	36037.02	1.519453

Sumber: Hasil Data Olahan Eviews, 9

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur ada atau tidak hubungan linier antara variabel independent. Adanya hubungan antara variabel dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan

nilai VIF dengan ketentuan jika nilai VIF (<10) maka tidak terkena multikolinieritas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui nilai VIF dari variabel independent yaitu nilai VIF LX_1 sebesar 1.519453 dan nilai VIF LX_2 sebesar 1,519453. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari kedua variabel independent tersebut kecil dari 10 yang artinya kedua variabel independent tidak terkena multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6: Hasil Estimasi Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.010381	Prob. F(4,5)	0.2313
Obs*R-squared	6.166092	Prob. Chi-Square(4)	0.1871
Scaled explained SS	1.206070	Prob. Chi-Square(4)	0.8771

Sumber: Hasil Data Olahan Eviews, 9

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang bagus seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mengetahui apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai chi square (Obs *R-Squared) dan nilai kritis *chi square* dengan ketentuan jika nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai *chi square* lebih besar dari kritis maka terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data, maka diketahui bahwa nilai *chi square* (Obs *R-Squared) adalah sebesar 0.1871. Sedangkan nilai kritis *chi square*

adalah sebesar 15.5073. Dapat dilihat bahwa nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.7: Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.064687	Prob. F(2,5)	0.9381
Obs*R-squared	0.252221	Prob. Chi-Square(2)	0.8815

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/17/21 Time: 10:53

Sample: 2010 2019

Included observations: 10

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.108455	0.809582	0.133964	0.8987
LOG(INVESTASI)	0.000209	0.001851	0.113019	0.9144
LOG(PP)	-0.004092	0.030015	-0.136330	0.8969
RESID(-1)	-0.226466	0.682901	-0.331623	0.7536
RESID(-2)	-0.053803	0.717074	-0.075031	0.9431
R-squared	0.025222	Mean dependent var	3.53E-15	
Adjusted R-squared	-0.754600	S.D. dependent var	0.009568	
S.E. of regression	0.012673	Akaike info criterion	-5.591790	
Sum squared resid	0.000803	Schwarz criterion	-5.440497	
Log likelihood	32.95895	Hannan-Quinn criter.	-5.757757	
F-statistic	0.032343	Durbin-Watson stat	1.648422	
Prob(F-statistic)	0.997287			

Sumber: Hasil Data Olahan Eviews, 9

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa data pengamatan terbebas dari gejala autokorelasi karena nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar $0.8815 > \alpha (0.1)$.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan keterangan dan perumusan hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian, dari hasil penelitian diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel independen (Investasi dan Pengeluaran Pemerintah) dan variabel dependen (PDRB) akan dijelaskan secara rinci. Berikut dibawah ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel:

4.3.1 Pengaruh Investasi Terhadap PDRB di Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil regresi, secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel Investasi memiliki nilai T prob. sebesar 0.0553 (<0.1) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial Investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak tahun 2010-2019. Kemudian diketahui koefisien regresi Investasi sebesar 0.003260 yang artinya jika Investasi naik sebesar 1% maka PDRB akan naik sebesar 0.003% periode 2010-2019.

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak, Karena investasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah, dimana dengan adanya investasi di Kabupaten Siak maka akan mengatasi kekurangan modal yang terjadi di Kabupaten Siak dan semakin tinggi nya nilai investasi di Kabupaten Siak akan mendorong serta memperlancar proses pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jazuli Rahman (2016) yang berjudul “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014” hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Banten. Dimana ketika jumlah investasi bertambah akan mempengaruhi besaran PDRB di Provinsi Banten.

4.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Siak

Berdasarkan penelitian diatas, secara parsial variabel Pengeluaran Pemerintah diketahui memiliki nilai T prob. sebesar 0.0557 (<0.1) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Maka variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak tahun 2010-2019. Kemudian diketahui koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah sebesar -0.052699, yang artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1% maka PDRB akan terjadi penurunan sebesar -0.052699.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Menik Fitriani dan Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap PDB dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini terjadi karena naiknya pengeluaran pemerintah tidak dibarengi

dengan naiknya penerimaan negara sehingga selalu terjadi defisit anggaran dalam realisasi APBN, kondisi ini dianggap tidak normal dalam teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan negara meningkat dan meningkatnya pengeluaran pemerintah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Kabupaten Siak tahun 2010-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

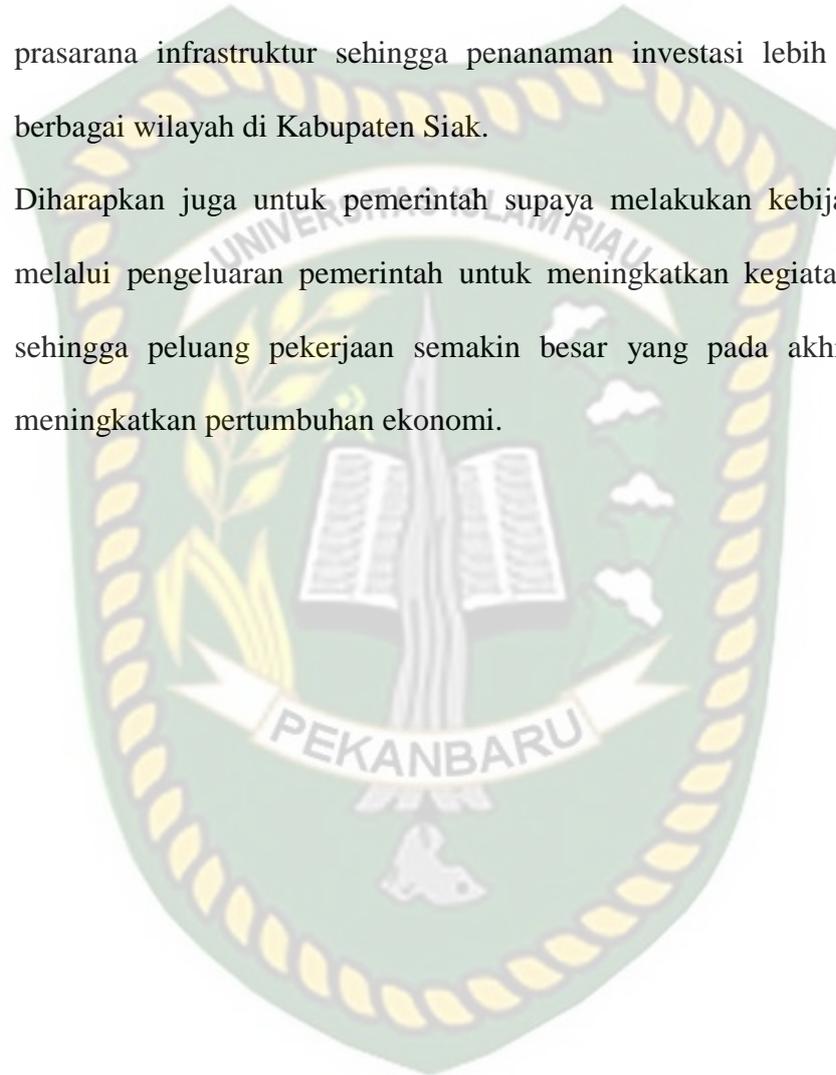
1. Investasi (X_1) diketahui memiliki nilai T prob. sebesar 0.0553 (<0.1) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial Investasi berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.
2. Pengeluaran Pemerintah (X_2) diketahui memiliki nilai T prob. sebesar 0.0557 (<0.1) maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2010-2019.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu:

1. Penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap PDRB seperti tenaga kerja, pendapatan asli daerah serta memperpanjang periode pengamatan penelitian.

2. Untuk pemerintah diharapkan dapat menarik investasi dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempermudah proses perizinan, menjaga stabilitas ekonomi serta memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur sehingga penanaman investasi lebih merata ke berbagai wilayah di Kabupaten Siak.
3. Diharapkan juga untuk pemerintah supaya melakukan kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga peluang pekerjaan semakin besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Yunarko. 2007. *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, PAD dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah*, Penelitian Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Arsyad, Lincolin, 2004. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Agustus 2006.
- A Samuelson, dkk, 2003. *Ilmu Makro Ekonomi*. PT. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Boediono, 1992, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.4: Teori Petumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Boediono, 2014: *Ekonomi Makro*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- BPS, 2020. *Produk Domestik Regional Bruto*, BPS, Kabupaten Siak.
- BPK, 2020. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, BPK, Provinsi Riau.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Dombusch, S Fischer. 1999. *Makroekonomia*. pWE, Warszawa.
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*, (Tesis). Semarang:Program Pasca Sarjana.
- Didi Nuryadin & Sodik Jamzani (2005). *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi)*. Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Jhingan, M.L, 2012, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Cetakan ke Empat Belas, Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Principles of Economics. Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Alih bahasa Chriswan Sungkono. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Laporan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi.* Yogyakarta: Beta Offset.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Ekonomi Teori Pengantar.* Edisi III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi. Teori Pengantar.* Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan,* Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, M.P. 1981. *Pembangunan Ekonomi di Dunia.* Ketiga. Edisi ke 2. Man inc. New York.
- Todaro.M.P dan Smith.S.C, (2011), "*Pembangunan Ekonomi*", Edisi Sebelas. Jakarta, Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 *Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 *Tentang Penanaman Modal Asing.*
- Widarjono, Agus, 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.